SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 1, Januari-Maret 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

PERISTIWA PEMBERONTAKAN PKI DI MADIUN TAHUN 1948 DARI PRESPEKTIF SOSIO-KULTURAL

Septian Dwita Kharisma[1], Parji[2], Nurhadji Nugraha[3]
[1,2,3] Fakultas Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Pascasarjana, Universitas PGRI Madiun
e-mail: septiandwita09@gmail.com[1], parji@unipma.ac.id[2], mbahnur02@yahoo.com[3],

Diterima: *19/7/2025*; Direvisi: *18/12/2025*; Diterbitkan: *16/2/2026*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peristiwa pemberontakan PKI Madiun 1948. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sosio-kultural masyarakat Madiun sebelum pemberontakan, mengidentifikasi faktor-faktor sosio-kultural yang memicu terjadinya pemberontakan, serta menelaah dampak sosio-kultural pasca-peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, penelusuran dokumen arsip, dan surat kabar sezaman. Analisis dilakukan dengan kerangka teori sosio-kultural, termasuk konsep stratafikasi sosial, hegemoni (Gramsci), kepemimpinan karismatik (Weber), dan materialisme historis (Marx). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosio-kultural masyarakat Madiun saat itu ditandai oleh stratafikasi sosial yang tajam antara kaum elit dengan masyarakat kelas bawah (petani dan buruh). Hegemoni feodal dan tekanan ekonomi di era kolonial menciptakan penderitaan dan depresi di kalangan masyarakat bawah, yang memicu munculnya gerakan-gerakan masianisme dan kerinduan akan perubahan. Pemberontakan ini meletus sebagai puncak dari konflik kelas dan budaya, di mana kekerasan yang terjadi merupakan bentuk balas dendam sosial terhadap tatanan feodal yang mapan. Dampak pasca-peristiwa adalah munculnya perlawanan kolektif, solidaritas sosial antar korban, dan stigma negatif yang dilekatkan pada masyarakat Madiun hingga beberapa dekade kemudian, yang membentuk memori kolektif dan identitas sosial di wilayah tersebut.

Kata Kunci: *Pemberontakan PKI Madiun 1948, Sosio-kultural, Stratafikasi Sosial, Konflik Kelas, Stigma*

ABSTRACT

This research examines the 1948 Madiun PKI rebellion. This research aims to analyze the socio-cultural conditions of the Madiun community before the rebellion, identify the socio-cultural factors that triggered the rebellion, and examine the socio-cultural impact after the event. This research uses a historical research method with a qualitative approach. Data were collected through literature studies, archival documents, and contemporaneous newspapers. The analysis was conducted using a socio-cultural theoretical framework, including the concepts of social stratification, hegemony (Gramsci), charismatic leadership (Weber), and historical materialism (Marx). The results show that the socio-cultural conditions of Madiun society at that time were characterized by a sharp social stratification between the elite and the lower class (farmers and workers). Feudal hegemony and economic pressure in the colonial era created suffering and depression among the lower classes, which triggered the emergence of movements of masianism and longing for change. These rebellions erupted as the culmination of class and cultural conflicts, where the violence was a form of social revenge against the established feudal order. The post-event impact was the emergence of collective resistance, social solidarity

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i1.6519

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 1, Januari-Maret 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

between victims, and the negative stigma attached to the Madiun community until decades later, which shaped collective memory and social identity in the region.
Keywords: *PKI Madiun Rebellion of 1948, Socio-cultural, Social Stratification, Class Conflict, Stigma*

PENDAHULUAN

Penelitian tentang pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun tahun 1948 merupakan kajian yang memuat dinamika politik, ideologi, dan sosial pada masa awal kemerdekaan. Peristiwa ini menjadi perhatian banyak peneliti, baik dari dalam maupun luar negeri karena mencerminkan benturan kepentingan antara berbagai kekuatan politik yang ada pada saat itu. Kajian yang telah dilakukan umumnya berfokus pada aspek politik dan militer, seperti strategi pemberontakan, tokoh-tokoh terlibat, serta dampak terhadap stabilitas nasional. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih didominasi oleh sudut pandang pro maupun kontra terhadap tindakan pemerintah dan PKI tanpa melihat konteks sosial yang luas. Sehingga penting untuk menghadirkan perspektif dalam memahami peristiwa ini dengan konteks kehidupan sosial dan budaya nya.

Perspektif masyarakat mengenai peristiwa pemberontakan PKI di Madiun beragam. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa peristiwa pemberontakan PKI di Madiun merupakan tindakan politik spontan oleh kelompok komunis yang menjunjung semangat revolusi. Bahkan, terdapat anggapan bahwa pemberontakan ini dilakukan oleh tokoh-tokoh luar Madiun. Padahal, kondisi sosial masyarakat Madiun saat itu sangat kompleks, terbagi dalam berbagai kelas seperti elit priyayi, kyai, borjuis, dan rakyat kecil (buruh dan petani), yang muncul sebagai hasil dari percampuran budaya tradisional dan kolonial yang kosmopolit. Pertemuan kedua budaya tersebut menciptakan kompleksitas dalam memahami dinamika sosial tahun 1948 (Gultom, 2020).

Peristiwa pemberontakan PKI di Madiun merupakan sebuah peristiwa yang tak lepas dari dinamika sosial masyarakat Madiun, saat itu selain terdapat masyarakat elit (Priyayi dan Kyai), borjuis (pengusaha dan pemilik tanah) juga terdapat masyarakat kelas bawah seperti kaum miskin kota, kaum buruh dan kaum petani yang muncul akibat adanya realitas sejarah yang melaju. Kalangan priyayi saat itu memiliki pengaruh yang besar dalam struktur sosial desa, terutama dengan kepemilikan tanah perdikan yang sejak masa kolonial telah memperkuat posisi mereka sebagai elit lokal yang tidak melebur dengan kawula desa (Qomar & Pratama, 2024). Kondisi sosial masyarakat Madiun tersusun sedemikian rupa akibat pengaruh dua kebudayaan yang saling berkelindan antara budaya tradisional dan kolonial sehingga membentuk kebudayaan yang kosmopolit namun masih tetap mempertahankan sifat tradisionalitasnya. Dalam konteks ini, posisi masyarakat abangan dan petani miskin berada dalam tekanan yang memicu kemarahan sosial. Persinggungan antara kepentingan kelas dan perubahan nilai budaya menciptakan ruang rawan konflik yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam kerangka sosial-kultural.

Penelitian tentang masyarakat sebelum pemberontakan PKI di Madiun juga belum benar-benar terkaji dengan baik, dibuktikan dengan biasnya pemahaman sejarah soal pemberontakan PKI di Madiun itu sendiri termasuk isu soal sosial masyarakat yang begitu kurang dibahas dalam historiografi ini. Padahal isu sosiologis masyarakat dapat memberikan gambaran bagaimana corak masyarakat Madiun saat itu, sehingga terdapat sebagian dari massa rakyat mengikuti gerakan PKI pada 1948, PKI sendiri memiliki daya tarik sendiri dimata rakyat partai ini menegaskan, tercapainya masyarakat Indonesia yang sosialistis, yaitu susunan masyarakat

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i1.6519

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 1, Januari-Maret 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

Indonesia dimana alat-alat produksi dimiliki oleh dan dipergunakan kepentingan masyarakat (Arsip Nasional: 1758).

Kebudayaan masyarakat di masa lalu tentu ini menjadi topik yang perlu diangkat, karena identitas masyarakat Madiun dipengaruhi oleh aspek religiusitas, aspek budaya elit (Priyayi) dan aspek kolonial. Dengan melihat bahwa masyarakat tidak homogen secara ideologis maupun kultural, maka penting untuk meninjau lebih jauh bagaimana dinamika kekuasaan, ketimpangan ekonomi, serta pertarungan simbolik antara kelompok sosial berperan dalam menggerakkan konflik sosial di Madiun, hal ini mendorong terjadinya perang saudara "Proletariat melawan borjuasi" (Kuntowijoyo, 2016).

Klasifikasi sosial yang muncul pasca mencengkramnya hegemoni kolonial di wilayah Madiun yang dimulai pada tahun 1830 berdampak dengan munculnya konflik sosial yang ada di masyarakat Madiun. Kebijakan yang tidak adil, kesewenang-wenangan, dan perebuhan lanskap yang awalnya berpegang pada budaya tradisional berpindah ke budaya modern, membuat kehidupan membuat rakyat semakin terhimpit dan depresi. Pada abad ke-20, ketika semangat bangkitnya nasionalisme dan masuknya ideologi politik di kalangan kaum intelektual, kaum intelektual yang terlibat dalam gerakan politik seperti Serikat Islam (SI).

SI kemudian menyebarkan pengaruhnya secara cepat pada kaum lebih miskin dikota-kota, kemudian juga memperoleh pengikut luas dari daerah pedalaman (McVey:2017). kelak SI dipengaruhi oleh paham kiri bermetamorfose menjadi PKI, di Madiun anggota PKI terdiri dari intelektual dan kaum buruh, mereka berusaha untuk memobilisasi massa rakyat dan melakukan perlawanan terhadap colonial meski akhirnya mereka dipenjara serta dibuang ke Digul (Soekowinito & Koesdim. 1980). Kondisi ini menunjukkan bahwa gerakan radikal di Madiun tidak muncul secara instan, melainkan tumbuh dari akumulasi sejarah panjang yang berakar pada persoalan sosial dan budaya.

Dinamika sosial tersebut diperparah oleh kekosongan kekuasaan pasca kemerdekaan dan perubahan sosial akibat revolusi, Pasca kemerdekaan ekonomi mulai melemah seperti yang dikemukakan Dr. Boel. bahwa kondisi ekonomi di wilayah Republik terus memburuk. Jika tidak segera diambil langkah nyata, maka hubungan ekonomi akan semakin rapuh dan tanah subur bagi komunisme akan tumbuh (Mook, 1948) Kondisi ini menyebabkan gesekan antara kelas sosial dan ideologi di pedesaan dan perkotaan. Namun, aspek sosio-kultural ini belum banyak diteliti secara mendalam. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali Peristiwa Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 dari perspektif sosio-kultural sebagai upaya mengisi kekosongan dalam historiografi lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah (*historical research*) dengan pendekatan variabel sosial dan budaya untuk mengkaji masyarakat Madiun tahun 1948. Penelitian ini dimulai dengan penentuan topik yang berfokus pada kondisi sosial, budaya, dan gerakan pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Topik dipilih berdasarkan relevansi akademik serta kebutuhan penguatan historiografi lokal yang masih jarang dikaji secara mendalam. Proses penelitian berlangsung melalui literatur mendalam, eksplorasi ruang dan waktu, serta kritis terhadap dinamika masyarakat, sehingga hasil penelitian juga mampu menafsirkan pola sosial sebelum dan sesudah peristiwa.

Tahap berikutnya yaitu pengumpulan sumber (heuristik) yang dilakukan melalui penelusuran buku, arsip, dokumen kolonial, laporan intelijen, surat kabar sezaman, serta hasil penelitian terdahulu. Sumber yang ditemukan kemudian melalui tahap verifikasi internal untuk

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i1.6519

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 1, Januari-Maret 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

menguji kredibilitas isi dan eksternal untuk menilai autentitas dokumen (Madjid & Wahyudi, 2014). Proses ini penting untuk memilah sumber, menghindari kecenderungan narasi, serta memastikan sumber yang dihasilkan berlandaskan pada data yang dapat dipertanggung jawabkan.

Tahap akhir penelitian adalah interpretasi dan historiografi. Pada tahap interpretasi, peneliti menggunakan analisis untuk menelaah informasi secara mendalam dan sintesis untuk membentuk pemahaman sejarah yang utuh (Kuntowijoyo, 2005). Proses ini dilakukan secara analitis-sintesis untuk menemukan pola hubungan antara perubahan sosial, kondisi ekonomi, dan munculnya gerakan PKI. Análisis kemudian disusun secara kronologis agar perkembangan peristiwa dapat dipahami secara runtut. Hasil interpretasi ini dimasukkan dalam bentuk penulisan sejarah (historiografi) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam perkembangan peristiwa tahun 1948. Dengan demikian, peneliti menawarkan pemahaman mendalam tentang konstruksi sosial yang melatarbelakanginya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Sosio-Kultur Masyarakat Madiun

Konteks sosio-kultural masyarakat Madiun sebelum kemerdekaan merupakan pondasi penting dalam memahami dinamika sejarah daerah ini, terutama dalam peristiwa pemberontakan PKI yang tidak hanya melibatkan elit atau militer, tetapi juga rakyat kecil seperti buruh, petani, dan kaum miskin yang ingin hidup sejahtera; untuk menarik simpati mereka, PKI menggunakan kampanye seperti "tanah untuk rakyat", "hak buruh akan diperjuangkan", hingga pembagian tanah kepada rakyat.

Kondisi Sosiologi Masyarakat Sebelum Kemerdekaan

Stratifikasi sosial masyarakat Jawa pada masa itu terbagi menjadi tiga golongan utama: *bendara* (keluarga keraton dan keturunan bangsawan), priyayi (pegawai negeri dan kaum terpelajar), serta *wong cilik* (petani, tukang, dan pekerja kasar). Kaum elit mendominasi wilayah pedalaman dan pusat-pusat kerajaan yang dipengaruhi budaya para-Islam, sedangkan *wong cilik* umumnya menganut ajaran sinkretis yang disebut abangan. Dalam struktur ini, kyai atau santri memiliki posisi strategis sebagai pemuka agama dengan otoritas tinggi karena kemampuan keagamaannya, sehingga menjadi salah satu elit sosial di masyarakat. Mereka mendirikan pondok pesantren sebagai sarana dakwah Islam kepada kaum abangan.

Kaum Priyayi desa sering disebut sebagai “jago”, tokoh linuwih yang memediasi antara rakyat dan penguasa, sekaligus menguasai tanah cacah dari kerajaan. Kekayaan mereka diukur dari jumlah kawula penggarap tanah. Menurut Suzanne Keller (1965), kyai yaitu tokoh yang memiliki wewenang, pendukung moral, dan orang terkenal. Hubungan antara priyayi dan petani bersifat patron-klien (kawula-gusti), namun sering kali timpang, diwarnai pajak tinggi, kerja paksa, dan sistem pancasan yang merugikan petani. Sementara itu, kyai juga memiliki tanah luas dan mendirikan desa perdikan, yaitu wilayah bebas pajak dan kerja wajib, untuk kepentingan agama dan sosial. Beberapa contoh desa perdikan di Madiun adalah Banjarsari Lor dan Kidul, Sewulan, Taman, Kuncen (Kota Madiun), dan Kuncen Caruban (Qomar & Pratama, 2024).

Kyai perdikan memegang kontrol penuh atas urusan politik, ekonomi, dan budaya desa, bahkan berani menolak kebijakan kolonial yang merugikan. Meski tertindas, wong cilik tak memiliki daya melawan, dan justru menggantungkan harapan pada mitos Ratu Adil

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i1.6519

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 1, Januari-Maret 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

sebagai penyelamat. Di sisi lain, kolonialisme Belanda memperkuat stratifikasi melalui Regeling Reglement (1854), yang menempatkan Eropa di puncak, disusul Timur Asing, dan pribumi sebagai lapisan terbawah. Segregasi ini tercermin dalam akses pendidikan, pekerjaan, hingga pola permukiman.

Penamaan jalan di Madiun pun menunjukkan struktur sosial tersebut: tokoh wayang digunakan untuk kampung pribumi sebagai simbol kontrol budaya, sementara nama gunung dipakai untuk kawasan elit seperti tempat tinggal bupati atau priyayi. Dengan demikian, baik secara struktural maupun simbolik, sistem sosial masa itu memperkuat dominasi elit atas wong cilik, baik melalui budaya, agama, maupun kekuasaan politik yang terlembagakan.

Kondisi Budaya Masyarakat Madiun Sebelum Kemerdekaan

Sebelum kemerdekaan, budaya masyarakat Madiun sangat dipengaruhi oleh struktur feodal yang kuat, di mana bupati dan priyayi memiliki otoritas penuh atas rakyat kecil. Laporan Koran *Oost Indie* (1911) menyebutkan bahwa bupati sering menunjukkan kebesaran dengan mengadakan upacara besar seperti pada perayaan Idul Fitri di Pendopo Kabupaten, yang memaksa priyayi untuk tampil berpakaian lengkap dan mahal, sehingga menciptakan beban ekstra bagi mereka. Pemerintah kolonial tidak melarang praktik ini karena dianggap membantu kontrol sosial melalui mitos absolutisme bupati sebagai pemimpin yang memiliki karisma spiritual (Onghokham, 2018). Hubungan antara elit dan rakyat bersifat patron-klien atau *kawula-gusti*, di mana rakyat harus patuh tanpa bisa mengeluh, karena titah priyayi dianggap sebagai perintah Ilahi.

Kaum feodal semakin diperkuat oleh pemerintah kolonial untuk kepentingan penjajah, sementara rakyat petani semakin tertindas akibat pajak dan kerja rodi yang terus meningkat. Petani menjadi penyewa tanah dalam sistem landrente, di mana raja dianggap sebagai pemilik semua tanah. Wong cilik terpaksa bekerja di sawah milik elit tanpa mendapat hak sepenuhnya atas hasil panen. Budaya sinkretis dan spiritualistik masyarakat desa membuat mereka tetap percaya pada konsep *ratu adil* sebagai penyelamat dari penindasan yang menjadi dasar gerakan spiritual seperti masianisme (Soekowinoto & Koesdim, 1980).

Gerakan masianisme muncul sebagai bentuk protes spiritual terhadap penindasan feodal dan kolonial. Contohnya adalah Saminisme, yang dipimpin oleh tokoh seperti Wongsorejo di Desa Gowok, yang menolak pajak dan kerja rodi sebagai bagian dari ajaran agama baru yang disebut "Agama Adam" (J.E Jesper, 1917). Gerakan ini didorong oleh keyakinan pada tokoh spiritual yang dianggap memiliki daya linuwih dan kemampuan untuk membebaskan rakyat dari tekanan penguasa.

Interaksi dengan budaya Eropa juga mulai mengubah masyarakat Madiun, terutama kalangan priyayi. Gaya hidup Indische mulai berkembang di wilayah kota, dengan munculnya arsitektur, mode, dan gaya hidup baru (Gultom, 2020). Kaum priyayi bahkan ada yang menikahi orang Eropa, menghasilkan keturunan Indo. Namun, laporan Residen Boissevain (1907) menunjukkan bahwa sebagian besar pejabat pribumi di Madiun memiliki reputasi buruk, cenderung korup, dan sering saling menjatuhkan melalui intrik dan fitnah.

Pada awal abad ke-20, politik etis Belanda membuka peluang pendidikan Barat bagi kaum priyayi melalui sekolah-sekolah seperti OSVIA dan STOVIA. Hal ini menciptakan kelompok baru bernama priyayi terdidik yang lebih kritis terhadap kondisi sosial dan mulai peduli pada nasib rakyat kecil. Tokoh seperti Harjo Utomo dari Pilangbango menjadi contoh nyata transformasi priyayi muda dalam memobilisasi massa melalui organisasi pencak silat

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i1.6519

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 1, Januari-Maret 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

seperti Setia Hati dan PSC, serta aktivisme dalam Serikat Rakyat. Ia sempat ditangkap Belanda karena memicu mogok massal buruh KA dan dibuang ke Boven Digul.

Meski begitu, semangat radikal terus berkobar hingga era pendudukan Jepang dan masa kemerdekaan, di mana rakyat Madiun semakin aktif dalam gerakan perlawanan, baik secara terorganisir maupun bawah tanah. Gerakan ini membuktikan bahwa pendidikan modern dan organisasi massa mampu merubah budaya masyarakat yang awalnya pasif menjadi progresif dan penuh semangat perjuangan.

Dampak Kondisi Sosial Budaya Pra-Kemerdekaan Terhadap Masyarakat Madiun di Era Revolusi

Perubahan sosial dan budaya masyarakat Madiun pada masa pra-kemerdekaan berdampak signifikan terhadap dinamika politik dan pergerakan revolusioner di era kemerdekaan. Madiun yang sebelumnya merupakan wilayah dengan struktur feodal yang kuat, dipimpin oleh bupati, priyayi, dan kyai, mulai mengalami pergeseran setelah rakyat kecil seperti petani dan buruh bangkit melawan penindasan kolonial dan feodal. Kaum priyayi radikal yang sebelumnya aktif dalam organisasi pergerakan seperti Serikat Islam dan Budi Utomo menjadi motor penggerak mobilisasi massa pada masa revolusi. Mereka membentuk organisasi bersenjata seperti PESINDO dan memobilisasi pemuda desa dan kelas bawah untuk bergabung dalam tentara revolusioner seperti PETA dan Hisbullah.

Kaum abangan atau masyarakat pedesaan yang masih percaya pada konsep *ratu adil* menjadi subjek utama dukungan bagi ideologi kiri, termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI), yang menawarkan program anti-feodal dan egaliter. Gerakan komunis berhasil membangun basis massa di kalangan buruh KA, tani, dan rakyat kecil yang ingin hidup sejahtera tanpa tekanan elit feodal. Contohnya adalah gerakan Barisan Tani Indonesia (BTI) yang berhasil menghapus sistem sewa tanah pada 1946. Namun, hal ini memicu benturan antar kelas sosial dan kelompok ideologis, terutama dengan masyarakat santri di wilayah perdikan yang mendukung partai Islam seperti Masyumi serta kaum priyayi nasionalis yang berafiliasi dengan PNI.

Di tengah pergolakan internal, kondisi politik internasional juga turut mempengaruhi situasi di Madiun. Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur menyebabkan perebutan pengaruh ideologi di Indonesia. Amerika Serikat khawatir akan penyebaran komunisme, sementara Uni Soviet memberikan dukungan terselubung kepada gerakan kiri, termasuk PKI. Isu *Red Drive* Proposal dari delegasi KTN yang melibatkan AS menciptakan ketegangan dan provokasi di tubuh pemerintahan Indonesia. Hal ini diperparah dengan kembalinya Musso dari Moskow dengan garis politik radikal yang semakin memperkuat posisi PKI dan menantang pemerintah Soekarno-Hatta.

Konflik domestik semakin memanas setelah munculnya kontroversi terkait Perjanjian Renville yang dinilai merugikan Republik, serta kebijakan rasionalisasi militer oleh Hatta yang dikenal dengan nama RERA. Situasi ini diperumit oleh pembentukan Front Demokrasi Rakyat (FDR) oleh Amir Syarifuddin, yang menjadi kekuatan dominan dengan basis pendukung luas, khususnya di kalangan penduduk desa (Sucahyo et al, 2024). Kelompok kiri menuduh pemerintah bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk memberantas komunisme. Ketegangan politik yang tak terkendali ini akhirnya memuncak dalam bentuk Pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948, yang dipimpin langsung oleh Musso dengan dukungan massa buruh, petani, dan pemuda revolusioner. Pemberontakan ini

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i1.6519

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 1, Januari-Maret 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

menjadi titik kulminasi pertentangan antara kekuatan kiri dan pemerintah, hingga akhirnya berhasil ditumpas oleh pasukan TNI di bawah komando Sudibyo.

Pemberontakan Madiun bukan hanya aksi politik biasa, tetapi hasil akumulasi dari ketegangan sosial budaya pra kemerdekaan, polarisasi ideologi global, serta konflik internal elit politik Indonesia. Dampaknya sangat besar: hubungan Indonesia dengan AS dan Belanda semakin rumit, sementara posisi komunis di kancah politik nasional semakin lemah hingga akhirnya dibubarkan secara resmi pada tahun-tahun berikutnya.

Kondisi Politik Internasional dan Nasional

Pada akhir dekade 1940-an, peta kekuatan global mengalami pergeseran tajam ketika dua kekuatan besar yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai poros utama pasca kemenangan atas Blok Fasis. Kedua negara membentuk blok ideologi yang saling berseberangan: Amerika Serikat memimpin Blok Barat yang menjunjung sistem liberal-kapitalis, sementara Uni Soviet membentuk Blok Timur dengan ideologi sosialis-komunis. Uni Soviet menerapkan Doktrin Zhdanov yang menuntut kesetiaan ideologis dari partai komunis di seluruh dunia (Efimova, 2014). Sebagai tandingan, Amerika Serikat meluncurkan Doktrin Truman untuk membendung pengaruh komunisme global melalui bantuan ekonomi dan militer (Rubinstein, 1981). Ketegangan dua kutub ini menyebar ke berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara, dan memengaruhi dinamika politik Indonesia yang masih dalam tahap konsolidasi pasca kemerdekaan.

Di dalam negeri, situasi politik Indonesia memanas akibat Perjanjian Renville yang ditandatangani oleh Amir Syarifuddin pada Januari 1948. Perjanjian ini membatasi wilayah Republik dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kelompok kiri (Suroso, 2001). Amir kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang didukung oleh sejumlah serikat buruh dan kesatuan militer. Pemerintah Hatta menanggapinya dengan kebijakan Reorganisasi dan Rasionalisasi (RERA) yang membubarkan militer non-reguler. Dalam konteks ini, berkembang isu bahwa pemerintah menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat melalui proposal Red Drive yang berisi rencana pembasmian komunis dengan imbalan dana 56 juta dolar (Poeze, 2011). Isu tersebut menyulut ketegangan antara pemerintah dan kelompok kiri yang merasa terancam oleh represi negara.

Ketegangan diperparah oleh isu globalisasi komunisme. Partisipasi delegasi Indonesia dalam Konferensi Pemuda Asia di Kalkuta, India, Februari 1948 yang memunculkan spekulasi bahwa Indonesia akan mengadopsi strategi perjuangan baru ala komunis internasional (Efimova, 2014; Pusat Sejarah TNI, 2009). Konferensi ini menegaskan konsolidasi gerakan kiri Asia yang berhaluan anti-imperialis dan anti-kapitalis, sehingga mendorong semakin kerasnya sikap politik PKI terhadap pemerintah. Hubungan Indonesia dengan Uni Soviet pun menjadi sorotan, karena dianggap memicu pertarungan ideologi yang tak terhindarkan di dalam negeri.

Di tengah situasi tersebut, Musso kembali ke Indonesia pada Agustus 1948 setelah bertahun-tahun menetap di Uni Soviet. Ia membawa dokumen, strategi, dan konsep “garis baru” untuk memperkuat pengaruh PKI dan mendorong Indonesia merapat ke blok komunis (Efimova, 2014). Musso mengkritik taktik lama PKI yang dianggap terlalu lunak, dan menggagas pembentukan Front Nasional sebagai wadah konsolidasi kekuatan revolusioner. Rangkaian pidato dan kampanye politiknya menyulut respons keras dari kelompok nasionalis dan militer. Penolakannya terhadap kompromi dengan pemerintah, serta sikap anti-Amerika yang tegas, memperkuat kecurigaan bahwa ia membawa garis Moskow secara

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i1.6519

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 1, Januari-Maret 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

utuh ke dalam politik nasional. Rencana dan sikap Musso disampaikan pula dalam pertemuannya dengan tokoh komunis internasional seperti De Groot dan Suslov. Mereka menyusun strategi untuk menyerang kolonialisme Belanda dan imperialisme Amerika, serta mengarahkan kritik tajam kepada Hatta yang dianggap sebagai pengkhianat revolusi (Efimova, 2014).

2. Pengaruh PKI Menjelang Pemberontakan Di Madiun Tahun 1948: Ditinjau dari Kondisi Sosial

Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 tidak hanya berakar pada faktor politik dan ideologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kompleks. Salah satu aspek penting yang menjadi latar belakang adalah mobilitas sosial, terutama di kalangan pemuda kelas bawah yang sebelumnya tertindas. Banyak pemuda yang melihat militer dan laskar sebagai sarana untuk meningkatkan status sosial mereka pasca-kemerdekaan. Laskar seperti Hisbullah, PESINDO, Laskar Buruh Kereta Api, dan organisasi militer lainnya menjadi tempat mereka mencari pengakuan, pekerjaan, serta martabat di tengah masyarakat.

Namun, kebijakan RERA (Rasionalisasi dan Reorganisasi Angkatan Bersenjata) yang dikeluarkan oleh Mohammad Hatta pada 1948 mengubah situasi. Kebijakan ini menyebabkan pembubaran banyak laskar non-reguler, sehingga ribuan anggota laskar kehilangan pekerjaan dan posisi sosial yang telah mereka capai. Hal ini memicu rasa kecewa dan frustasi, terutama di kalangan mantan tentara muda yang merasa tidak lagi dihargai oleh negara. Kelompok inilah yang kemudian dimobilisasi oleh Front Demokrasi Rakyat (FDR) dan PKI untuk menentang pemerintah.

Di sisi lain, ketegangan kelas sosial di pedesaan semakin memanas. Masyarakat Madiun secara umum terbagi atas tiga kelompok utama: priyayi/santri (kelas atas), abangan (kelas menengah/bawah), dan buruh tani (kelas bawah sekali). Kaum priyayi dan santri, yang memiliki tanah dan kuasa, mendominasi struktur sosial desa, sementara petani kecil dan buruh hidup dalam tekanan ekonomi dan penindasan feodal. PKI memanfaatkan situasi ini dengan menggalang dukungan dari kaum abangan dan proletar melalui program reformasi agraria, pembagian tanah, dan anti-feodalisme.

Organisasi seperti Barisan Tani Indonesia (BTI) menjadi alat mobilisasi massa untuk melakukan perlawanan terhadap struktur ketimpangan agraria. BTI gencar mengkampanyekan reforma agraria, penghapusan sewa tanah, dan penguasaan lahan oleh petani. Gerakan ini mendapat respon besar di desa-desa, terutama setelah adanya aksi penyerobotan tanah secara sepihak di wilayah hutan dan tanah bekas Belanda. Aksi-aksi ini menjadi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap elit feodal dan kapitalis.

Pidato Musso, tokoh PKI yang pulang dari Uni Soviet, semakin memanaskan situasi. Dalam kampanyenya di Madiun pada September 1948, Musso menjanjikan bahwa kaum buruh dan tani akan menjadi pemimpin baru, tanah dibagi-bagikan, dan lurah dipilih dari kalangan miskin. Janji ini disambut antusias oleh rakyat kecil yang selama ini tertindas. Beberapa hari sebelum pemberontakan meletus, desa-desa di sekitar Madiun mulai dikuasai oleh kelompok FDR-PKI, tanah bengkok dihapus, dan kepala desa diganti dengan kader pro-komunis.

Kondisi Budaya: Kharisma, Ideologi dan Mobilisasi Massa

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i1.6519

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 1, Januari-Maret 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

Madiun pada awal masa revolusi mengalami kondisi sosial yang tidak menentu, masyarakat teradikalisasi secara kolektif akibat pengaruh tokoh-tokoh kiri yang sudah eksis sejak era 1920-an. Angkatan muda intelektual yang pernah berjuang bawah tanah melawan Belanda dan Jepang menjadi aktor utama dalam gerakan massa. Keterhubungan mereka dengan elit nasional seperti Sukarno dan Amir Syarifuddin memberi jalan untuk mendapatkan posisi strategis meskipun tetap bekerja di tingkat lokal.

Tokoh seperti Letkol Sumarsono dan Kolonel Djokosujono menjadi representasi "bapakisme", yaitu figur pemimpin karismatik yang mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material para pengikutnya. Mereka berhasil memobilisasi rakyat dari desa-desa miskin, buruh, dan petani untuk bergabung dalam laskar-laskar bersenjata seperti BKR dan PRI. Gie (2005) mencatat bahwa bagi rakyat miskin, bergabung dalam kemiliteran adalah cara untuk keluar dari kemiskinan dan ikut serta dalam perjuangan nasional. Ong Hok Ham (2018) menyebutkan bahwa komandan yang memiliki kedekatan emosional dan solidaritas tinggi terhadap massa akan memiliki posisi kuat di mata rakyat.

Kaum muda dan rakyat miskin yang bergabung dengan laskar kiri mendapat fasilitas yang jauh lebih baik daripada kehidupan sehari-hari mereka. Selain gaji layak dan senjata, mereka diberikan asrama dan makanan bernutrisi tinggi, berbeda dengan makanan rakyat biasa yang hanya gaplek dan tiwul. Fasilitas ini membuat banyak rakyat rela aktif dalam organisasi militer yang dikendalikan kaum kiri. Selain itu, mereka dijanjikan kehidupan sejahtera dan kesetaraan melalui slogan “sama rata sama rata” yang mudah diterima oleh masyarakat abangan.

Selain patronase material, indoktrinasi ideology dilakukan secara sistematis melalui Marx House di Madiun, sebuah pusat pendidikan marxis yang didirikan oleh PESINDO. Marx House dibuka Juni 1946 dan menjadi tempat pelatihan politik bagi kader-kader kiri. Popularitas tokoh di masa revolusi dinilai dari empat faktor : (1) peran di masa lalu, (2) hubungan dengan elit politik, (3) kelihaian saat revolusi, dan (4) posisi dalam panggung politik nasional. Rekam jejak inilah yang menciptakan kharisma dan loyalitas rakyat kecil terhadap tokoh tertentu, seperti Musso, tokoh PKI yang pulang dari Uni Soviet pada Agustus 1948. Dalam waktu singkat, Musso berhasil merebut kendali penuh atas PKI dan merombak struktur partai secara radikal.

Musso juga mendorong fusi berbagai organisasi kiri seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), SOBSI, dan PBI ke dalam bendera tunggal PKI. Kehadirannya di Madiun pada 8 September 1948 disambut ribuan orang. Ia digambarkan sebagai “Bapak Buruh Indonesia” dan “Leninnya Indonesia”, tokoh yang akan menyelamatkan rakyat kecil dari penindasan kapitalisme dan feodalisme. Dalam pidato-pidatonya, Musso menyerukan perlawanan terhadap borjuasi dan menjanjikan pembagian tanah kepada petani serta kepemimpinan kaum proletar.

Sebuah Konklusi

Dari kondisi yang demikian ini bisa disimpulkan bahwa peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 meletus karena kondisi logis dari serangkaian konflik yang kompleks yang diselimuti faktor sosial budaya, sehingga menciptakan sebuah konflik besar yang tak terhindarkan, sehingga bisa dikatakan bahwa terjadinya peristiwa ini karena:

a. Kegagalan Negara dalam menciptakan harapan baik bagi masyarakat
b. Kekecewaan para laskar ini berkelindan dengan api konflik kelas di pedesaan yang terjadi selama berabad-abad.

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i1.6519

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 1, Januari-Maret 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

c. Laskar yang kecewa dan petani yang radikal, disatukan oleh kepemimpinan karismatik dan ideologi komunis.

3. Pemberontakan PKI di Madiun 1948 ditinjau dari Kondisi Sosial: Perebutan Struktur Kekuasaan oleh Rakyat

Pada 18 September 1948, Musso, Amir Syarifuddin dan kaum komunis lainnya mengalami *fait accompli*, pada akhirnya Musso mengimplementasikan konsepnya yaitu membentuk Front Nasional. Front Nasional adalah konsep politik Musso yang tertuang dalam dokumen yang bernama Djalan Baru Menudju Republik Indonesia. Musso (1953) menuliskan, PKI berkeyakinan, bahwa pada saat ini Partai kelas buruh tidak dapat menjelesaikan sendiri revolusi demokrasi borjuis ini dan oleh karena itu PKI harus bekerja bersama dengan partai-partai lain.

Kaum Komunis sudah semestinya berusaha mengadakan persatuan dengan anggota-anggota partai dan organisasi-organisasi lain. Satunya persatuan semacam itu ialah Front Nasional. Dalam menyusun ini PKI harus mengambil inisiatif dan dalam Front Nasional itu PKI harus juga memainkan rol yang memimpin. Sederhananya Musso memiliki keinginan untuk membentuk suatu kesatuan gerakan yang menentang imperialisme dan mendukung revolusi Indonesia yang progresif. Diikuti oleh berbagai partai politik yang ada di Indonesia, dengan harapan tercapainya cita-cita PKI yaitu menghancurkan imperalisme dan menimalisir oposisi terhadap politik PKI.

Pada 18 September 1948, pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) meletus di Madiun sebagai hasil akumulasi konflik sosial, politik, dan ideologis yang mendalam. Pemberontakan ini dipimpin langsung oleh Musso, yang kembali dari Uni Soviet dengan doktrin komunis radikal serta dukungan dari tokoh kiri seperti Amir Syarifuddin. Musso mengambil langkah strategis dengan membentuk Front Nasional, sebuah koalisi politik yang bertujuan untuk menyatukan berbagai partai dan organisasi kiri dalam rangka melawan imperialisme dan memperkuat posisi kaum proletar.

Di tingkat akar rumput, gerakan ini didukung kuat oleh massa buruh dan petani yang selama ini tertindas dalam struktur feodal dan kapitalistik. Serikat Rakyat memainkan peran penting dalam distribusi tanah secara sepihak, sehingga menciptakan basis massa yang loyal terhadap PKI. Desa-desa di sekitar Madiun mulai dikuasai oleh kelompok pro-FDR-PKI, kepala desa diganti dengan kader pro-komunis, dan sistem pemerintahan baru dibangun dengan prinsip kerakyatan. Restrukturisasi juga terjadi di wilayah Kresek dan Kebonsari, di mana tokoh seperti Sukemi dan Wikana menjalankan pemerintahan baru yang menggantikan elit birokrat lama dengan kader revolusioner.

Namun, gerakan ini tidak lepas dari tekanan ideologis dan represi terhadap pihak yang tidak setuju. Laporan dari koran *Indische Courant* (1948) dan sumber-sumber lokal menyebutkan bahwa perebutan kekuasaan dilakukan secara sistematis dan disambut antusias oleh rakyat miskin yang merasa terwakili. Meskipun demikian, ada indikasi adanya paksaan bagi masyarakat untuk aktif dalam organisasi revolusioner, serta penekanan terhadap kelompok yang tidak sejalan dengan agenda Front Nasional.

Kondisi Budaya: Perang Simbol dan Legitimasi Kekerasan

Setelah PKI mengambil alih kekuasaan melalui Front Nasional di Madiun, mereka menggunakan kekerasan sebagai sarana mempertahankan hegemoninya. Dalam perspektif Gramsci, hegemoni adalah bentuk perjuangan baru terhadap tatanan lama yang mengakar (Lester, 2000). Kekuasaan tersebut diejawantahkan melalui penindasan terhadap tokoh-

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i1.6519

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 1, Januari-Maret 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

tokoh agama dan elit lokal yang menolak program mereka. Sebagaimana ditegaskan Weber bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kehendak meski ada perlawanan (Santoso, 2001). Maka kekerasan yang dilakukan PKI dipahami sebagai upaya membentuk "masyarakat baru" melalui jalur revolusi. Karl Marx bahkan menyatakan bahwa "kekerasan adalah bidan dari setiap masyarakat lama yang sedang hamil tua dengan masyarakat baru" (Budiardjo, 2007), suatu pandangan yang dijadikan legitimasi tindakan revolusioner mereka.

Kekerasan ini tampak nyata pada pembunuhan Kyai Imam Mursyid Mutaqien (Ricklefs, 2013), pembantaian Bupati Magetan dan tokoh desa yang menolak redistribusi tanah, serta pembunuhan santri dan serangan terhadap pesantren (Suratmin, 2012). Selain kekerasan fisik, PKI menyebar propaganda ideologis seperti yel-yel anti-santri dan penyebaran isu bahwa Divisi Siliwangi adalah tentara Belanda (*Stoot Leger Wilhelmina*), yang memprovokasi rakyat untuk menentang pemerintah. Penggantian pejabat desa oleh kader PKI, seperti pengangkatan Sucipto sebagai bupati dan Sumadi sebagai camat di Magetan, adalah bentuk kontrol atas struktur sosial. MASYUMI pun merespons melalui Majalah Guntur, menyerukan perlawanan terbuka terhadap PKI sebagai ancaman terhadap umat Islam dan Republik. Konflik ini pun mengeras menjadi pertentangan antara Islam dan komunisme (Poeze, 2011), menjelma dalam bentuk kekerasan timbal balik di tingkat lokal.

Namun, usaha PKI membangun hegemoni melalui kekerasan berujung kegagalan. Kekuasaan Front Nasional tidak mendapat simpati karena praktik represif mereka terhadap rakyat dan perangkat desa. Berbeda dengan Revolusi Bolshevik yang ditopang dukungan luas buruh dan tani, revolusi PKI gagal karena tidak mampu menggalang dukungan kultural masyarakat Jawa. Polarisasi antara abangan dan santri, pengaruh feodalisme yang masih kuat, dan dominasi kharismatik Soekarno yang tak tertandingi menjadikan gerakan PKI kehilangan legitimasi sosial. Selain itu, keterikatan masyarakat pedesaan dengan tokoh agama dan nasionalis seperti MASYUMI dan PNI juga menjadi penghalang besar bagi PKI untuk menanamkan pengaruh secara luas dan berkelanjutan.

4. Dampak Sosial Restrukturisasi, Kekerasan Balasan dan Solidaritas

Masyarakat di kawasan Madiun mengalami penindasan baru di bawah pemerintahan Front Nasional, di mana harapan akan kesejahteraan berubah menjadi kekecewaan. Pemerintah ini menetapkan kebijakan baru seperti pemungutan pajak dan rekrutmen paksa ke dalam Front Nasional, bahkan dengan intimidasi bersenjata (Gie, 2005). Laki-laki dan perempuan di atas usia 15 tahun diminta menjadi anggota tanpa memandang agama atau ideologi, dengan ancaman bagi yang menolak. Pemerintahan ini juga menutup RRI dan menggantinya dengan Radio Front Nasional sebagai alat propaganda, serta mengontrol akses keluar-masuk kota melalui pasukan PKI.

Masyarakat urban yang lebih kritis menanggapi propaganda ini dengan skeptisisme, dan penolakan mulai muncul, sebagaimana ditunjukkan dalam pertemuan di Gedung Lawu, di mana seorang wartawan bernama Supardi yang mengkritik gerakan ini ditawan dan dibunuh di Desa Kresek. Penolakan juga muncul dari kalangan pelajar setelah terbunuhnya Mulyadi, yang justru memperkuat gerakan anti-PKI. Pelajar bahkan melakukan sabotase simbolik seperti menyebarkan poster anti-Musso, yang memicu tindakan represif dari pemerintahan Front Nasional. Saat pasukan Divisi Siliwangi masuk ke Madiun, PKI melarikan diri ke Gunung Wilis, dan pasukan gabungan dari Tentara Pelajar, Laskar Hizbullah, dan TNI melakukan pengejaran.

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i1.6519

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 1, Januari-Maret 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

Harian Het Eindhovensch Dagblad (14 Oktober 1948) mencatat bahwa tindakan Divisi Siliwangi berlangsung keras dan tanpa kompromi terhadap siapa pun yang teridentifikasi sebagai PKI. Pemerintah pun mengupayakan pemulihan keamanan melalui tindakan penerangan dan edukasi publik. Setelah masuknya Divisi Siliwangi dan Brigade Soerahman dengan bendera merah putih, rakyat baru sadar bahwa mereka bukan tentara Belanda, dan mulai mendukung TNI (Soekowinoto, 1991).

Kementerian Penerangan (1953) mencatat bahwa aparat melakukan desinfeksi propaganda PKI melalui penyebaran selebaran, pidato, dan pamflet dalam bahasa lokal untuk menetralisir pengaruh FDR/PKI, termasuk membentuk solidaritas terorganisir agar masyarakat bekerja sama dengan pamong praja dan militer dalam menjaga ketertiban. Masyarakat pun mulai memburu simpatisan PKI secara mandiri menggunakan senjata tradisional sebelum akhirnya proses eksekusi diambil alih oleh aparat dan dilakukan terbuka di kota-kota seperti Ponorogo, Magetan, dan Kudus (Tim Jawa Pos, 1990). Rakyat yang merasa lebih aman kemudian secara aktif membantu operasi militer, memberikan logistik, tempat tinggal, dan membantu pengurusan jenazah korban, seperti dicatat oleh Soekowinoto di Desa Kresek (1991).

Dampak sosial dari tragedi ini juga melahirkan solidaritas warga, di mana bantuan material dan moril mengalir kepada para korban. Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Putri menggalang donasi pakaian dan uang, serta menyalurkannya ke wilayah terdampak seperti Walikukun (Guntur, 2 November 1948). Selain itu, kaum perempuan, termasuk para janda korban, berperan aktif dalam bantuan logistik, medis, dan membentuk organisasi perempuan seperti PERWARI dan Wanita Marhaen (Sulastri, 2000).

Solidaritas ini memperkuat posisi negara dalam menangani krisis akibat pemberontakan, apalagi dalam konteks di mana Republik Indonesia sedang terdesak akibat agresi militer Belanda dan terbatasnya kontrol atas wilayah. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dalam bentuk dukungan langsung menjadi elemen kunci dalam rekonstruksi pasca-konflik dan pemulihan stabilitas di Madiun.

5. Dampak Kultural: Trauma, Propaganda, dan Stigma Pasca Pemberontakan PKI di Madiun Tahun 1948

Pasca pemberontakan PKI di Madiun, masyarakat menunjukkan reaksi sosial yang kompleks terhadap mereka yang diduga terlibat dalam peristiwa revolusioner tersebut. Para simpatisan dan keluarga yang terkait dengan PKI mengalami stigmatisasi, dikucilkan secara sosial, dan dijauhkan dari relasi komunal sehari-hari. Menurut Nordholt dan Poeze (2022), sekitar 35.000 pendukung FDR dipenjara yang mayoritas dari kalangan militer kelompok tempur, sementara korban jiwa yang jatuh belum diketahui secara pasti. Aidit memperkirakan bahwa terdapat 10.000 korban dari pihak FDR dan 1.500 korban dari pihak yang mereka lawan

Dalam konteks ini, negara melancarkan propaganda berskala besar untuk menggambarkan kekejaman FDR dan PKI melalui berbagai media seperti radio, teater, pertunjukan wayang, hingga surat kabar. Bahkan penguburan korban FDR digunakan sebagai momen mobilisasi massa anti-komunis, sementara TNI melakukan eksekusi cepat dengan legitimasi "hukuman militer". Akibat propaganda yang masif ini, muncul trauma kolektif dan reaksi sosial di tingkat bawah.

Hanif (2011) menunjukkan bahwa masyarakat yang bukan PKI maupun yang menjadi simpatisannya sama-sama hidup dalam ketakutan, khawatir akan adanya balas dendam atau

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i1.6519

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 1, Januari-Maret 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

penindasan lanjutan. Di tengah kecemasan ini, kaum perempuan, terutama ibu rumah tangga, memainkan peran sebagai penjaga stabilitas kultural keluarga seperti yang diajarkan dalam falsafah Jawa, khususnya petuah Ronggowarsito: "Begja kang eling lan waspada." Nilai-nilai ini disampaikan secara verbal dan non-verbal dalam ruang domestik sebagai respons atas ketegangan sosial pasca konflik.

Namun demikian, seiring waktu, stigma terhadap PKI justru berkembang menjadi stigma kolektif terhadap Madiun sebagai sebuah wilayah. Pasca G30S 1965, terutama pada masa Orde Baru, narasi sejarah yang bias menjadikan peristiwa Madiun 1948 dan G30S 1965 sebagai dua kejadian yang dipadukan dalam ingatan publik. Terlebih karena keduanya terjadi di bulan September dan diperingati pada tanggal yang sama, membuat publik gagal membedakan antara dua peristiwa tersebut.

Akibatnya, berbagai kekeliruan muncul, seperti asumsi bahwa Monumen Kresek berkaitan dengan peristiwa 1965, atau bahwa warga Madiun adalah "keturunan Musso." Stigma ini diperkuat oleh KEPRES No. 153 Tahun 1967 tentang Hari Kesaktian Pancasila yang memperkokoh narasi anti-komunis secara nasional. Pernyataan Sugiharto, Ketua Fraksi Karya Pembangunan (FKP) dalam Berita Yudha (1 Oktober 1981), yang menyebut bahwa kader PKI di Madiun masih aktif secara terselubung, menunjukkan bagaimana propaganda negara membentuk konstruksi stigma jangka panjang terhadap daerah ini. Konsekuensinya tidak hanya pada ranah sosial, tetapi juga budaya.

Masyarakat Madiun dianggap tetap terhubung dengan PKI, bahkan kesenian tradisional seperti Dongkrek sempat terancam punah karena dikaitkan dengan PKI, meskipun kini mulai dilestarikan kembali. Padahal secara historis, peristiwa Madiun 1948 merupakan hasil dari dinamika revolusi dan kegelisahan sosial akibat sistem negara yang belum stabil pasca-kolonialisme. Dukungan sebagian masyarakat terhadap PKI kala itu tidak lepas dari situasi progresif dan revolusioner yang mereka alami, dan Madiun sebagai daerah yang hidup dalam denyut perubahan sosial justru menjadi korban dari sistem yang belum adil dan mapan.

Oleh karena itu, jika ditilik secara objektif, stigma terhadap Madiun tidak memiliki dasar historis yang kuat dan merupakan hasil dari pelapisan narasi sejarah negara yang bias sejak masa awal Orde Baru, ketika komunisme dijadikan musuh ideologis utama demi meneguhkan posisi rezim dan membangun legitimasi kekuasaan berbasis ideologi tunggal Pancasila (Hadi dan Kusuma, 2012).

KESIMPULAN

Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 merupakan puncak ketegangan sosial akibat struktur masyarakat feodal yang menindas kelas bawah. Petani dan buruh tertekan oleh dominasi priyayi, pamong praja, dan kaum agamawan yang menguasai alat produksi dan kekuasaan sosial. Kolonialisme memperparah ketimpangan ini melalui stratifikasi sosial dan eksploitasi tenaga rakyat. Dalam kondisi tersebut, muncul gerakan-gerakan perlawanan baik tradisional maupun modern yang kemudian dimanfaatkan oleh PKI sebagai sarana revolusi.

Secara sosial budaya, masyarakat Madiun yang masih terikat pada otoritas agama dan adat tidak sepenuhnya menerima gagasan revolusioner PKI. Fragmentasi sosial, konflik ideologi, dan perbedaan afiliasi partai menyebabkan gerakan PKI gagal memperoleh dukungan menyeluruh. Akibatnya, pemberontakan justru memunculkan kekerasan horizontal antarkelompok masyarakat. Kegagalan PKI juga diperparah oleh dominasi narasi negara yang

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i1.6519

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 1, Januari-Maret 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

membentuk stigma terhadap Madiun dan warganya, menjadikannya simbol pengkhianatan dan komunisme.

Penelitian ini memperkaya historiografi lokal dengan pendekatan *history from below*, menyoroti dinamika kelas, budaya, dan konflik melalui teori Gramsci, Weber, dan Marx. Implikasi praktisnya mencakup pentingnya pendidikan sejarah kritis, kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial, serta upaya rekonsiliasi berbasis budaya lokal. Madiun perlu direkonstruksi kembali dalam narasi sejarah nasional secara objektif dan manusiawi.

Disarankan agar penelitian serupa dilakukan di wilayah lain dan dengan pendekatan yang lebih beragam, termasuk dampak stigma lintas generasi. Pemerintah daerah dapat menguatkan kurikulum sejarah lokal, memfasilitasi ruang diskusi publik, serta merevitalisasi situs-situs budaya. Lembaga kebudayaan dan masyarakat sipil juga perlu aktif dalam mengarsipkan sejarah lisan dan membuka ruang narasi alternatif agar sejarah Madiun tak lagi dibaca secara bias dan sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip Nasional, Kementerian Pertahanan, Nomor Berkas:1758

Boissevain, W.T.L. (1907). *Memorie Van Overgave van Residentie Madioen*. Diambil dari https://www.nationaalarchief.nl/en/research/archive/2.10.39/invnr/93/file/NLHaNA_2.10.39_93_0001?eadID=2.10.39&unitID=93&query=Madioen.

Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.co.id/books?id=_dZ247rCydIC.

Efimova, M. L. (2014). *Dari Moscow Ke Madiun? Stalin-PKI dan Hubungan Diplomatik Uni Soviet-Indonesia 1947-1953*. Yogyakarta: Syarikat.

Eindhovensch Dagblad. (1948). Communisten aan het roer F.D.R.: Volksdemocratisch Front in Indonesië De tweede graad van de revolutie. Diambil dari https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB27:017813020:mpeg21:p00006.

Gie, S. H. (2005). *Orang-Orang Dipersimpangan Kiri Jalan*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka. https://books.google.co.id/books?id=hofHPOHTkXkC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false.

Gultom, A. Z. (2020). Kebudayaan Indis sebagai Warisan Budaya Era Kolonial. *Warisan: Journal Heritage and cultural heritage*, Vol 1, No 1. Diunduh dari https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/warisan/article/view/166/118.

Hadi, W. D., & Kusuma, G. (2012). Propaganda Orde Baru 1966-1980. *Jurnal Verleden: 1 (1)*. Diambil dari http://journal.unair.ac.id/filerPDF/4_jurnal%20propaganda_dwiwahyono hadi.pdf.

Hanif. M. (2011). Peranan Wanita Desa Soco Bendo Magetan dalam Mengatasi Dampak Psikologi Sosial Pasca Madiun Affair 1948 (Studi Sejarah Sosial). *Jurnal Agastya* 1 (1). Diunduh dari https://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/128/0.

Indische Courant voor Nederland. (1948). *Revolutie in Madioen ving op 12 September aan.* Diambil dari https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000287026:mpeg21:p00001.

Jasper, J. E. (1917). *Betreffende Het Onderzoek In Zake De Saminbeweging, Ingesteld Ingevolge het Gouvernement Besluit van 1 Juni 1917* No. 20.

Keller, S. (1965). *Beyond the ruling class: Strategic elites in modern society*. Random House. https://books.google.com/books?id=0XreAAAAMAAJ

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i1.6519

Kementerian Penerangan. (1953). Propinsi Jawa Timur.

Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya. https://books.google.co.id/books?id=gLBrAwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false.

Kuntowijoyo. (2016). *Petani, Priyayi dan Mitos Politik.* Yogyakarta: MataBangsa. https://books.google.co.id/books/about/Petani_Priayi_dan_Mitos_Politik.html?id=U2esDwAAQBAJ&redir_esc=y.

Lester, J. (2000). *The dialogue Of Negotiation: Debates on Hegemony in Russia and the West.* London: Pluto Press. https://philpapers.org/rec/LESTDO-3.

Madjid, D., & Wahyudi, J. (2014). *Ilmu Sejarah Sebagai Pengantar*. Jakarta: Kencana

Mcvey, Ruth T. (2017). *Kemunculan Komunisme di Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu

Musso. (1953). *Djalan Baru Menudju Republik Indonesia*. Djakarta: Jajasan Pembaharuan.

Mook, Van, HJ. (1948) *Notulen Van De Vergadering gehouden op 20 September 1948 te 09.00 Uur Ten Huize van de Legercommadant.* Den Haag: Algemeen Rijksarchief

Nordholt, H. S., & Poeze. H. (2022). *Merdeka The Stuggle for Indonesian Independence and the Republik precarious rise 1945-1950.* Amsterdam*:* Amsterdam University press. https://books.google.co.id/books?id=47bpEAAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Onghokham. (2018). Madiun dalam Kemelud Sejarah Priyayi dan Petani di Karisidenan *Madiun Abad XIX*. Jakarta: Kompas Gramedia Populer. https://books.google.co.id/books?id=x3mpDwAAQBAJ.

Oost-Indië. (1911). *Het Vaderland*. 's-Gravenhage. Diunduh dari https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:001491110:mpeg21:p00005.

Poeze, H.A. (2011). *Madiun 1948: PKI Bergerak*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=TdOLDAAAQBAJ.

Pusat Sejarah TNI. (2009). *Komunisme di Indonesia Jilid II: Penumpasan Pemberontakan PKI 1948*. Jakarta: Sidisi.

Qomar, A. S., & Pratama, S. Y. (2024). Antara Merdeka dan Dijajah: Problematika Kawula Desa Perdikan di Wilayah Eks Karesidenan Madiun, 1742-1962. *Jurnal Sejarah Indonesia*, *7*(2), 226–238. https://doi.org/10.31947/jsi.v7i2.33066.

Ricklefs, M. C. (2013). *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangnya dari 1930 Sampai Sekarang*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. https://books.google.co.id/books/about/Mengislamkan_Jawa.html?id=Jvj1DQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Rubinstein, A. Z. (1981). *Soviet Foreign Policy since World War II*. Massachuset: Winthrop Publishers, Inc. https://books.google.co.id/books/about/Soviet_Foreign_Policy_Since_World_War_II.html?id=0Oa3AAAAIAAJ&redir_esc=y .

Santoso, T. (2001). Kekuasaan dan Kekerasan. *Jurnal UNAIR*, 14(4). Diunduh dari https://journal.unair.ac.id/MKP@kekuasaan-dan-kekerasan-article-2589-media-15-category-8.html.

Soekowinito, A., & Koesdim. (1980). *Sejarah Kabupaten Madiun*. Pemerintah Kabupaten Madiun Tingkat II Madiun.

Soekowinoto, A. (1991). *Kresek Pusat Pembrontakan PKI di Madiun*. Pemerintah Daerah DATI II Madiun.

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i1.6519

Sucahyo, I. R., Kharisma, S. D., Pratama, I. P., Labibah, A. K., Siregar, A. R. S., Herlamb, S. D. R., ... & Donggo, M. S. A. (2024). Ketertiban Ditengah Pembantaian: Perjuangan Kepolisian Madiun Raya Sekitar Masa Pemberontakan 1948. *Journal of Education Research*, *5*(4), 6481-6494. https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1961.

Sulastri. (2000). *Peran Kaum Perempuan Dalam Penumpasan Pembrontakan PKI di Madiun* (Tulisan tidak diterbitkan). Fakultas Pendidikan Pengetahuan Sosial Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Madiun.

Suratmin. (2012). *Kronik Peristiwa Madiun PKI 1948*. Yogyakarta: Mata Padi Presindo.

Suroso, S. (2001). *Berbagai Fakta dan Kesaksian Sekitar Peristiwa Madiun*. Jakarta: Pustaka Pena.

Tim Jawa pos. (1990). *Lubang-lubang pembantaian: Petualangan PKI di Madiun*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. https://books.google.co.id/books?id=x9UFCgAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false.

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i1.6519